

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sejak beberapa tahun belakangan ini, krisis lingkungan yang terjadi di Indonesia khususnya Papua hal ini menarik perhatian dari berbagai kalangan seperti organisasi internasional, masyarakat global, dan pegiat lingkungan. Greenpeace Indonesia sebagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang lingkungan. Memperhatikan masalah deforestasi sebagai masalah yang serius, dimana fokusnya ialah menjaga alam tetap lestari dan menjalankan kampanye pelestarian hutan. Bagi greenpeace melingungi alam beraarti melindungi masyarakat, melindungi tumbuhan, makhluk hidup, dan melindungi iklim global yang sangat penting bagi kehidupan (Greenspace FAQ 2020, 1).

Sebelum masuk jauh kedalam pokok masalah dan pembahasan, penting untuk mengetahui proses Greenpeace melakukan advokasi kampanye berperan melawan buruknya kondisi lingkungan akibat eksploitasi hutan yang berlebihan. Proses pembentukan Greenpeace didasari atas nilai-nilai lingkungan dan kemudian mereka telah menjalankan tugas penting dalam mempengaruhi perkembangan politik dan ekonomi lewat isu-isu sejak tahun 1990-an (Hurrell And Kingsbury 1992, 113).

Beberapa NGO telah menjadikan isu lingkungan sebagai pekerjaan inti utama, salah satunya Greenpeace. Greenpeace memiliki pengaruh besar pada arah kebijakan. Mereka memiliki kemampuan untuk mempengaruhi rasa empati publik, yang paling penting bagi Greenpeace membentuk opini publik dan mendapatkan dukungan publik. Menyadari pentingnya hal ini, beberapa negara mendukung keberadaan NGO dan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan (Hurrell And Kingsbury 1992, 131).

Greenpeace telah melakukan perjalanan ke berbagai wilayah di Indonesia sala satu wilayah yang menjadi perhatian Greenpeace saat ini ialah Papua. Untuk

memantau perkembangan pengelolaan hutan yang makin memburuk akibat deforestasi. Greenpeace sudah ada sejak lama tidak hanya memperhatikan lingkungan tapi juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan, terutama dampak kerusakan alam yang berakibat langsung pada masyarakat di sekitar. Dalam menangani isu deforestasi di wilayah ini, mereka membentuk berbagai rangkaian aksi nyata salah satu yang di jalankan mereka ialah advokasi kampanye membawa isu-isu deforestasi ini lebih luas kerana publik dan hukum untuk mencari berbagai bentuk dukungan dan tekanan kepada pihak terkait serta mempengaruhi pemerintah untuk memberikan kebijakan yang berpihak pada lingkungan dan masyarakat.

Data yang dimuat dalam akun resmi ([www.greenpeace.org/indonesia](http://www.greenpeace.org/indonesia), 2020) tentang luas hutan di wilayah selatan Papua pada tahun 2020 mencapai 57.000 hektar. Secara umum ini merupakan lahan konsesi yang telah dibuka oleh perusahaan Korindo. Padahal berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS 2020) Papua memiliki luas hutan 34,4 juta hektar pada tahun 2020. Kini terjadi penurunan akibat kebakaran hutan dan penebangan liar (deforestasi). Disini kita akan melihat langkah-langkah yang dipakai Greenpeace Indonesia membawa isu deforestasi. Dari informasi tersebut bisa disimpulkan bahwa masih ada deforestasi yang dilakukan oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan.

Gambar 1 Hutan adat Petrus



Sumber: Greenpeace (2018). *Hutan adat telah berubah menjadi petak perkebunan kelapa sawit*. Di akses dari <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-57830492>

Namun disisi lain Greenpeace menemukan kelemahan dimana akses untuk menelusuri pergerakan perusahaan secara bertahap dari wilayah konsesi yang berdampak deforestasi cukup sulit dikarenakan letak wilayah yang cukup jauh dari akses informasi dan juga media yang terbatas di area tersebut dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mencari data dan fakta dengan mengumpulkan informasi ini mereka lakukan dengan melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat, agama, LSM dan Pemerintah. Dengan mengumpulkan bukti-bukti, mengamati kebakaran yang terjadi terjadi secara sistematis dan terkonsep di area operasi Perusaah korea selatan yang beroperasi di Papua dengan nama Korindo (Korea Indo) kebakaran yang terjadi dinilai terjadi dilakukan dengan cara sengaja di lahana konsensi melewati batas-batas area operasi sebagaimana kebakaran terjadi pada arah pendaran barat ke arah timur dan dilakukan dalam skala besar dalam batas-batas area operasi Korindo.

Gambar 2 Citra Satelit Area Deforestasi



*Sumber: Foto Nanang Sujana (2017). Deforestasi di Boven Digul. Di akses dari <https://thegeckoproject.org/id/articles/the-secret-deal-to-destroy-paradise/>.*

Permasalahan utamanya adalah deforestasi yang dilakukan oleh Korindo menyebabkan dampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat dimana kerusakan hutan mengganggu kebutuhan dan mata pencaharian masyarakat. Korindo sebagai aktor utama yang dituntut bertanggung jawab atas masalah yang terjadi di wilayah

tersebut juga kepada masyarakat. Namun, sebagai industri kelapa sawit besar Korindo tidak memberi biaya ganti rugi atas wilayah-wilayah yang telah dipakai dan banyak atas masalah inilah Greenpeace merespon tindakan Korindo ke rana hukum dengan tujuan menghentikan operasi perusahaan. Hambatannya adalah catatan penegakan pemerintah yang lemah dan tidak konsisten, serta adanya undang-undang penciptaan lapangan kerja yang berorientasi pada bisnis dan ekonomi daripada lingkungan” (Greenpeace 2021, 3).

Di wilayah hutan Papua telah ditetapkan sebagai hutan moratorium atau sebuah kebijakan yang bertujuan untuk melindungi suatu wilayah dari pembangunan. Kini Kebijakan moratorium hutan Indonesia di wilayah selatan papua di pakai untuk kepentingan korporasi disinilah terjadi sebuah persoalan. perintah Presiden kepada kementerian dan lembaga pemerintah yang terkait untuk menjalankan instruksi presiden. Namun instruksi presiden tidak memiliki konsekuensi hukum jika tidak dilaksanakan, dalam Inpres No. 10/2011 memberi perintah kepada tiga menteri Kehutanan, Dalam Negeri, dan Lingkungan Hidup untuk menjalankan instruksi tersebut di ara moratorium dan apabila interaksi ini menimbulkan kerugian bagi wilayah tersebut bisa di bawah ke rasan hukum dan digugat, karena instruksi tidak memiliki dasar hukum dan hanya berupa sebuah perintah resmi (Cifor 2021, 2).

Gambar 3 Peta Lokasi Moratorium



Sumber: The Gecko Project (2012). *Hutan primer menyimpan cadangan karbon*. Di akses dari <https://thegeckoproject.org/id/articles/the-secret-deal-to-destroy-paradise/>.

Perizinan untuk kelapa sawit karena tidak memiliki kriteria lingkungan yang sesuai, di kawasan dengan nilai konservasi tinggi atau High Conservation Value (HCV) dan stok karbon tinggi atau High Carbon Stock (HCS), perhutanan sosial, keanekaragaman hayati, kerentanan terhadap bencana alam, dll. Oleh karena itu, dengan menambahkan kawasan terlarang baru di Papua tanpa kriteria yang jelas dan tanpa mempertimbangkan hak-hak masyarakat setempat, pelarangan tersebut dapat menimbulkan konflik karena zona eksklusi tumpang tindih dengan kawasan lain yang didahulukan hak pakai secara adat.

Pada kurun waktu 2017-2018, Greenpeace menemukan bahwa terjadi sedikit peningkatan hilangnya hutan primer di Papua di area moratorium dari data-data yang terkumpul. Selama periode moratorium (2011 – 2018), total deforestasi di area moratorium mencapai 1,2 juta hektar, sedangkan total deforestasi Indonesia (di dalam dan di luar area moratorium) mencapai 4,38 juta hektar berarti bahwa deforestasi di area moratorium setara dengan 28,9% dari keseluruhan deforestasi yang terjadi di Papua. Peraturan Menteri (Peremen) No.10/2019 tentang Penentuan, Penetapan dan Pengelolaan lahan gambut merupakan ancaman tambahan bagi lahan gambut Indonesia.

Peraturan baru ini memungkinkan pemilik waralaba untuk terus mengeksploitasi kawasan dan melemahkan upaya untuk melindungi dan meningkatkan pengelolaan lahan gambut di Indonesia. Dari segi hukum, kebijakan penangguhan merupakan serangkaian arahan dari Presiden kepada instansi pemerintah terkait. Merupakan dokumen non-legislatif. Instruksi presiden tidak memiliki akibat hukum jika tidak diterapkan. (Inpres) Instruksi Presiden No. 5/2011 mengeluarkan keputusan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Chifor 2011, 7).

Disisi lain Instruksi Presiden memiliki kelemahan karena hanya berupa Instruksi Presiden, tanpa kekuatan sanksi atau penegakan hukum. Perubahan dari moratorium menjadi larangan tetap pemberian konsesi baru ke hutan perawan dan lahan gambut juga dalam bentuk Inpres, menunjukkan kurangnya komitmen politik dari Presiden atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan

diindikasikan bahwa kawasan hutan dan lahan gambut akan terus ditarik dari status lindung berdasarkan manfaat ekonomi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini membahas Greenpeace dalam upaya advokasinya dengan penulis larangan deforestasi di Papua (Indonesia) yang digunakan untuk menanam kelapa sawit namun berdampak negatif terhadap lingkungan, sekolah dan masyarakat. Di sini, peneliti memiliki pertanyaan penelitian: Bagaimana Greenpeace bekerja untuk melakukan kampanye advokasi pada kawasan deforestasi yang dilakukan Korindo di Papua ?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, penulis akan mencoba menganalisis dengan menggunakan data yang penulis peroleh dari buku, jurnal, artikel dan wawancara. Hal ini diperlukan untuk melihat apakah advokasi Greenpeace terhadap para pelaku deforestasi berpotensi memberikan dampak yang baik bagi lingkungan dan masyarakat.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai, baik tujuan secara umum dan tujuan secara khusus adalah sebagai berikut:

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana gerakan Greenpeace dalam melakukan advokasi kampanye terhadap masalah deforestasi yang dilakukan oleh Korindo serta dampaknya terhadap masyarakat yang ada di sekitar wilayah deforestasi beserta permasalahan yang terjadi di dalamnya.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk dapat menganalisis secara terperinci dan lebih dalam tentang langkah-langkah yang diambil Greenpeace dalam membangun jaringan advokasi kampanye terhadap PT

Korindo yang berimplikasi terhadap terganggunya kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah deforestasi.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka adapun manfaat yang diharapkan, baik secara akademis maupun praktis di dalam penelitian adalah sebagai berikut:

##### **1.4.1 Manfaat Akademis**

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi di dalam pengembangan studi Ilmu Hubungan Internasional khususnya mengenai bidang advokasi internasional dan/atau secara spesifik gerakan kampanye Greenpeace sebagai organisasi transnasional, dan dampak kemanusiaan bagi perlindungan masyarakat.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- a. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran bagi setiap pihak untuk bersama-sama peduli di dalam isu lingkungan khususnya deforestasi dan dengan cara turut aktif menyuarakan ide dan gagasan serta membantu memberikan perlindungan yang bertanggung jawab, adil, dan setara bagi masyarakat yang terkena dampak deforestasi dari perusahaan kelapa sawit.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan masyarakat dan pembaca serta menjadi referensi bagi berbagai pihak terkait seperti mahasiswa/I, akademisi, peneliti, pejabat pemerintah, dan praktisi hukum dan kemanusiaan.

#### **1.5 Metode Penelitian**

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teori penelitian kualitatif yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan teoritis atau deskriptif dan cenderung menggunakan analisis (Creswell 2012, 131).

Teknik pengumpulan data penulis adalah wawancara (Cresswell 2012). Untuk mengidentifikasi informan, penulis menggunakan teknik telemetri. Teknik maksud adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono 2011).

Selama proses pengambilan sampel, peneliti sebelumnya telah mengidentifikasi data tertentu dari subjek yang akan dijadikan sampel, tergantung pada tujuannya. Singkatnya, pengambilan sampel yang disengaja dipahami sebagai teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara tidak acak. Peneliti akan membentuk kriteria subjek yang akan dijadikan sebagai sumber penelitian tertentu.

### **1.5.1 Jenis dan Tipe Penelitian**

Jenis studi yang digunakan adalah studi kasus. Ini membahas fenomena sosial, peristiwa masa lalu, dan dokumen yang tidak dapat diukur dengan angka dan rumus. Oleh karena itu, individu atau organisasi harus dipandang sebagai bagian dari keseluruhan. Artinya, tidak boleh terisolasi dalam variabel atau asumsi. Sedangkan tipe penelitiannya adalah deskriptif analisis dengan menggunakan teori dan konsep sebagai alat penelitian mulai dari pemilihan masalah dan penelitian, membangun hipotesis dan kasus-kasus penelitian yang diangkat dari dalam buku dapat dijadikan model atau contoh bagi para peneliti dalam memulai dan melakukan penelitian (Bungin 2017). Oleh karena itu, studi ini didasarkan pada studi kasus dan analisis tipe deskriptif yang digunakan oleh para peneliti untuk mempelajari lebih lanjut tentang efektivitas advokasi Greenpeace Indonesia dalam menyelesaikan konflik larangan deforestasi (deforestasi) di Papua.

### **1.5.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

Dalam artikel ini, penulis menggunakan studi pustaka (Library Research), antara lain melalui buku, dokumen, dan website. Data dikumpulkan dari literatur dalam bentuk artikel, serta dari internet yang berkaitan dengan subjek penelitian serta buku atau dokumen yang dapat membantu dalam analisis data. Oleh karena itu, penelitian ini akan membuat fragmen data untuk memberikan wawasan dalam penyajian data. Dengan demikian J. Lexy Moleong menyatakan bahwa alat bantu telusur adalah alat pengumpulan data dan alat bantu telusur adalah milik penulis sendiri (Moleong 2007, 3).

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan buku dan surat kabar sebagai jenis penelitian formal dan dalam meneliti sumber data juga dengan mengamati dan mengomentari secara mendalam tentang masalah yang diteliti. Penulis berusaha membandingkan data tersebut. Dengan kata lain, penelitian adalah suatu metode meneliti, mengumpulkan dan menganalisis sumber data untuk diolah dan disajikan dalam bentuk laporan penelitian. Dalam penelitian ini, fokus penelitian adalah pada buku, artikel ilmiah dan jurnal yang terkait dengan masalah untuk memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi masalah yang termasuk dalam pembahasan peneliti topik yang diteliti.

Sumber data	Teknik Pengumpulan Data		Aspek data
Primer	Observasi	a. Pencatatan keadaan dan aktivitas masyarakat di wilayah industri kelapa sawit.	a. Data terkait pengaruh perkembangan operasional Korindo terhadap masyarakat.
	Wawancara	Arie Rompas (Team Leader Forest Campaigner – Greenpeace)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Bagaimana advokasi Greenpeace terhadap perusahaan PT Korindo yang telah melakukan deforestasi area moratorium pengelolaan hutan di Papua.</li> <li>● Jenis advokasi apa yang dipakai Oleh Greenpeace</li> <li>● Apa bentuk strategi kampanye Greenpeace dalam menekan masalah deforestasi yang dilakukan oleh perusahaan.</li> <li>● Praktik perusahaan transnasional PT. Korindo dalam bidang Kelapa Sawit yang dianggap merusak lingkungan?</li> <li>● Apakah Greenpeace sebagai NGO dengan nilai-nilai pro lingkungan ?</li> <li>● Siapa saja aktor yang terlibat</li> </ul>

			apakah ada Pemerintah Indonesia, MNC dan Greenpeace Indonesia atau Internasional ?
Sekunder	Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan Hasil Penelitian Greenpeace 2020.</li> <li>b. Journal of Political Issues Volume. 1, Issues. 2, Januari 2020, pp. 74-91 ISSN: 2685-7766.</li> <li>c. ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ekspansi Perkebunan Sawit, Korupsi Struktural dan Penghancuran Ruang Hidup Di Papua.</li> <li>b. Strategi Jaringan Advokasi Transnasional Greenpeace Indonesia Terkait Isu Deforestasi Hutan Indonesia oleh Wilmar International.</li> <li>c. Diplomasi Greenpeace Dalam menekankan Deforestasi yang sudah berlangsung.</li> </ul>

### 1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini hanya menggunakan satu cara, yaitu studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan (*library research*) dipilih oleh Peneliti dengan cara mempelajari beberapa sumber seperti buku, jurnal, laporan, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan masalah yang diangkat di dalam penelitian (Nazir 2003, 27). Hal tersebut dilakukan sebab studi kepustakaan erat kaitannya dengan kajian teoritis dan referensi yang berkaitan dengan aspek-aspek seperti aspek kebudayaan dan aspek norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti oleh Peneliti (Sugiyono 2003, 291). Namun beberapa sumber yang dipilih oleh Penulis tidak hanya terbatas dari buku, jurnal, dan laporan, akan tetapi Peneliti juga akan meneliti masalah dan memecahkannya menggunakan sumber-sumber yang kredibel lainnya seperti majalah, surat kabar baik yang bentuknya daring maupun cetak, media elektronik atau web yang ada internet yang sesuai dan berkaitan dengan masalah yang hendak diteliti.

### 1.5.4 Teknik Validasi Data

Validasi data adalah kegiatan mempelajari parameter yang dipelajari dari data yang dikumpulkan untuk menunjukkan bahwa parameter ini memenuhi

persyaratan penulis. Validasi metode kualitatif dimaksudkan untuk menegaskan bahwa metode analitik merupakan sesuatu yang perlu diteliti lebih lanjut. Definisi validitas menurut Arikunto adalah ukuran seberapa valid suatu tes. Suatu tes dikatakan valid jika tes itu mengukur apa yang seharusnya diukur. Suatu tes memiliki nilai tinggi jika hasilnya memenuhi kriteria, yaitu terdapat kesamaan antara tes dengan kriteria (Arikunto 1999, 65).

### **1.5.5 Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan bukan dalam bentuk angka, melainkan data yang diperoleh dari naskah wawancara, catatan lapangan, catatan pribadi, memo dan dokumen resmi lainnya. Oleh karena itu, tujuan penelitian kualitatif ini adalah untuk mendeskripsikan realitas empiris di balik fenomena tersebut secara mendalam, rinci dan mendalam. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah untuk mencocokkan kenyataan empiris dengan teori yang diterapkan dengan metode deskriptif (Moleong 2004, 131).

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan pada penelitian ini dibuat ke dalam empat bab, yang terdiri atas beberapa sub bab sebagai berikut.

#### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **Bab II Kajian Pustaka**

Bab ini berisi tinjauan pustaka, kerangka teoritik, kerangka pemikiran, dan argumen utama.

#### **Bab III Pembahasan**

Bab ini mendeskripsikan analisis dan kebijakan yang digunakan Greenpeace dalam menekan PT Korindo. Menggunakan teknik wawancara kepada narasumber yang

terlibat langsung dengan perusahaan terkait memakai advokasi kampanye kerana publik dan hukum dengan membawa hasil investigasi yang dikumpulkan atas masalah yang dilakukan oleh Korindo.

#### **Bab IV Penutup**

Bab ini berisi hasil dari penelitian dengan menjelaskan kesimpulan dan rekomendasi terkait penelitian yang diteliti.

